

**RENCANA STRATEGIS
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI
TAHUN 2015-2019**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2015

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi (Pusdikmas) Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdikmas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2015 sampai dengan 2019. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Renstra Badan Standardisasi Nasional dan Renstra Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi BSN Tahun 2015-2019.

Renstra Pusdikmas Tahun 2015-2019 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan dalam meningkatkan kinerja Pusdikmas untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan yang terencana, teratur dan terkendali dengan baik sehingga tercapai visi masyarakat yang berorientasi standar. Harapan kami semoga Renstra Pusdikmas Tahun 2015-2019 ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi menjadi lebih baik. Renstra ini juga diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan sehingga masyarakat dapat terlibat aktif memberi kritik dan masukan. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan standardisasi menjadi lebih baik lagi.

Jakarta, 2015

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pemasarakatan Standardisasi

Metrawinda Tunus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	9
2.1 Visi	9
2.2 Misi	9
2.3 Tujuan	9
2.4 Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS	10
3. 1 Arah Kebijakan Strategis	10
3.2 Kegiatan	10
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 130, Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta masyarakat standardisasi dan jaminan mutu
2. Penyusunan rencana dan program, pembinaan dan koordinasi di bidang pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu
3. Pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu
4. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu
5. Pelaksanaan masyarakat standardisasi dan jaminan mutu
6. Pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan dan pelatihan serta masyarakat di bidang standardisasi dan jaminan mutu
7. Pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi dibantu oleh 2 bidang yang terdiri dari :

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Standardisasi;
- b. Bidang Masyarakat Standardisasi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pusat Pendidikan dan Masyarakat Standardisasi telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja PUSDIKMAS 2010-2014 sebagai berikut : 1) Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan

mahasiswa/siswa), 2) Jumlah peserta pelatihan standardisasi, 3) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, 4) Jumlah peningkatan partisipasi anggota Masyarakat Standardisasi, (5) Jumlah peserta SNI Award, dan (6) Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi.

Sampai dengan tahun 2014 Capaian indikator kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi adalah : (1) Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan mahasiswa/siswa) mencapai 5.055 orang; (2) Jumlah peserta pelatihan standardisasi (instruktur dan peserta) mencapai 1.131 orang; (3) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian mencapai 16.961 orang; (4) Jumlah peningkatan partisipasi anggota Masyarakat Standardisasi sampai dengan tahun 2014 mencapai 4.151 orang; (5) Jumlah peserta SNI Award di tahun 2014 mencapai 159 peserta menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 180 peserta, sedangkan (6) Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi pada tahun 2014 mencapai 79,39.

Berdasarkan hasil tersebut, mayoritas capaian indikator kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi tahun 2010-2014 melebihi target yang telah ditetapkan. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru dan mahasiswa/siswa) mengalami peningkatan capaian yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembelajaran pendidikan standardisasi di 11 perguruan tinggi yang tengah dan telah mengajarkan pendidikan standardisasi. Demikian juga dengan kegiatan sosialisasi standardisasi yang secara berkala dilakukan oleh BSN kepada dunia pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan) baik secara aktif mendatangi lembaga pendidikan formal tersebut, maupun menerima kunjungan dari lembaga pendidikan untuk memperoleh informasi lebih dalam tentang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Selain dari pada itu, pengembangan sistem *e-learning* sebagai wujud pembelajaran mandiri dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian sangat berkontribusi dalam peningkatan jumlah capaian peserta pendidikan.

Demikian juga dengan peserta pelatihan standardisasi yang mengalami kenaikan, hal ini tentunya tidak terlepas dari peran dan keberhasilan layanan pelatihan standardisasi dalam membangun kompetensi sumber daya manusia, khususnya di tingkat organisasi maupun di lembaga penilaian kesesuaian. Terlebih dengan diberlakukannya *registrasi on line* dalam mendukung aplikasi layanan pelatihan, terbukti mempermudah pelanggan

pelatihan untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta pelatihan, baik untuk pelatihan publik maupun *in house training*.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini sebagai wujud upaya yang dilakukan Pusdikmas secara aktif dalam bekerjasama dengan komunitas di masyarakat, seperti komunitas Tangan Di Atas (TDA), Forum Layanan IPTEKS bagi Masyarakat (FLIPMAS) dan Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil Menengah (PUPUK) yang menjadi mitra BSN dalam kegiatan pemasyarakatan standardisasi. Demikian juga dengan upaya promosi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang aktif dilakukan oleh BSN melalui media digital dan media sosial. Pada era digital ini, media sosial menjadi media alternative yang cukup potensial, efektif dan efisien sebagai sarana promosi dan edukasi kepada publik.

Salah satu fungsi Pusdikmas adalah pelaksanaan dan pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan standardisasi dan jaminan mutu, dengan indikator kinerja Indeks kepuasan pelanggan (IKP) Diklat. Sampai tahun 2014, IKP Diklat mendapatkan kategori "BAIK", dengan nilai 79.39 (99.24% dari target yang diharapkan).

Namun demikian, tidak seluruh indikator kinerja Pusdikmas mengalami capaian yang memuaskan. Sebagai contoh, untuk jumlah peningkatan anggota Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Sesuai dengan Renstra BSN 2010-2014, proses perumusan SNI melibatkan anggota MASTAN. Namun sesuai dengan UU No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, proses perumusan SNI melibatkan semua kepentingan tidak hanya anggota MASTAN. Kebijakan baru ini yang menyebabkan program pemasyarakatan standardisasi tidak hanya berfokus kepada perekrutan anggota MASTAN namun juga menysasar kepada komunitas lain.

Sampai dengan tahun 2014, Jumlah MASTAN mencapai 4.151 orang dari target 4.400 yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan karena promosi dan rekrutasi yang dilakukan kurang optimal, bisa juga disebabkan karena kurangnya benefit yang ditawarkan untuk menjadi anggota MASTAN, yang berdampak terhadap kurangnya peminat menjadi anggota MASTAN.

Pusdikmas juga mempunyai tugas untuk melakukan promosi dan rekrutmen peserta SNI *Award*. Rekrutmen peserta SNI *Award* dilakukan dengan berbagai cara dan strategi yang

berbeda di tahun 2013 dan 2014 yaitu dengan memanfaatkan fasilitator SNI *Award*. Fasilitator SNI *Award* merupakan anggota MASTAN yang bertugas untuk mencari dan membimbing calon peserta SNI *Award*. Namun demikian, pada tahun 2014 meskipun dengan strategi yang sama, jumlah peserta SNI *Award* yang mendaftar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena rekrutmen SNI *Award* yang dilakukan melalui pertemuan dengan asosiasi industri ternyata tidak memberikan dampak *significant* terhadap jumlah peserta yang mendaftar.

Capaian yang telah dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Peningkatan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh BSN, mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat didalam memproduksi dan atau mengkonsumsi suatu produk belumlah didasarkan atas pengetahuan terhadap standar/mutu produknya melainkan masih didasarkan atas pertimbangan merk atau harga. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap standar dapat dilihat dari banyaknya produk luar negeri yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan standar dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan standar, kecuali produk diberlakukan secara wajib. Namun demikian, presentase tingkat kesesuaian produk terhadap SNI yang telah diberlakukan secara wajib masih dibawah tingkat kesesuaian produk yang SNInya diterapkan secara sukarela.

Capain yang telah dilakukan oleh Pusdikmas salah satu tujuannya untuk mningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Untuk meningkatkan persepsi masyarakat dibutuhkan program promosi, edukasi dan penyadaran masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, pengembangan pendidikan standardisasi mulai dari sekolah sampai perguruan tinggi, pembuatan kurikulum pelatihan standardisasi, peningkatan partisipasi masyarakat serta mendorong keterlibatan lembaga pelatihan dalam mendidik dan membina tenaga ahli standardisasi

Berdasarkan hasil Survei yang dilakukan oleh pihak ketiga (perguruan tinggi), tingkat Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi masuk kategori sedang dengan nilai 67,67 (target 75). Hasil ini mengindikasikan masih banyak yang harus dilakukan oleh Pusdikmas dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya standardisasi. Hasil survei menyebutkan bahwa

masyarakat sudah mengenal SNI dan mempunyai persepsi yang positif bahwa SNI untuk melindungi konsumen, meningkatkan kualitas dan daya saing industri. Namun masyarakat masih mempunyai persepsi yang rendah bahwa produk SNI mudah didapatkan. Hal ini sesuai dengan kenyataan di pasaran bahwa produk ber-SNI masih sedikit jumlah dan jenisnya. Hal ini tentu mendorong BSN untuk terus meningkatkan penerapan SNI pada pelaku usaha, sehingga produk barang yang beredar akan semakin banyak yang ber-SNI.

Hasil survei tingkat persepsi masyarakat juga menghasilkan bahwa persepsi masyarakat terhadap sertifikasi SNI masih rendah. Masyarakat baik itu dari unsur pelaku usaha, pemerintah, akademisi dan konsumen masih beranggapan bahwa proses sertifikasi SNI masih merupakan langkah yang tidak mudah dan mahal. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah masih setengah hati dalam memberikan keringanan pembiayaan dalam mengurus sertifikasi SNI. Sebagian besar masyarakat juga masih berpikir bahwa BSN yang melakukan mensertifikasi SNI. Melihat kondisi ini, Pusat Pendidikan dan Pemasarakan Standardisasi perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai prosedur bagaimana pelaku usaha menerapkan SNI khususnya kepada pelaku usaha kecil menengah. Disamping itu pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha dan masyarakat harus terus digalakkan.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan UU No 20 Tahun 2014 meliputi:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri

Untuk mewujudkan tujuan standarisasi dan penilaian kesesuaian, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menunjang kegiatan standarisasi di Indonesia. BSN secara konsisten mengkampanyekan SNI melalui berbagai kegiatan promosi dan edukasi publik yang gencar dilakukan di berbagai daerah dan melalui berbagai media komunikasi, agar masyarakat/konsumen mengutamakan standar dalam memilih produk, serta mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri yang ber-SNI. Dampak positif yang dihasilkan antara lain SNI sudah memasyarakat dan menjadi 'buah bibir'/dikenal masyarakat secara lebih luas, serta menjadi faktor pasar yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk yang berkualitas. Pada tahun 2010, BSN Menggagas Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI) yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden RI, dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, dengan mengkampanyekan penerapan SNI.

Untuk meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standarisasi, BSN telah memanfaatkan media sosial (email, youtube, facebook, twitter) untuk promosi dan edukasi tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian. Di era digitalisasi ini, media sosial menjadi alternatif promosi dan edukasi yang praktis dan efisien. Untuk menunjang pelaksanaan promosi melalui media sosial, Pusdikmas telah membuat materi promosi dalam bentuk audio visual yang akan disebarluaskan melalui dunia maya.

BSN melalui Pusdikmas juga menjalin kemitraan dengan MASTAN (Masyarakat Standardisasi Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), komunitas Tangan di Atas (TDA), Forum Layanan IPTEKS bagi masyarakat (FLIPmas), Perkumpulan Unit untuk Peningkatan UKM (PUPUK), BDS, asosiasi dan berbagai komunitas lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian. Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi juga melakukan pembinaan penerapan SNI kepada UKM kerjasama dengan para mitra. Dalam melakukan edukasi dan sosialisasi standarisasi, Pusdikmas juga bermitra dengan para penerap SNI. Para penerap SNI merupakan duta SNI yang dijadikan *role model* penerapan SNI bagi pelaku usaha lainnya. Para *role model* ini diharapkan dapat berbagi *success story* dalam penerapan SNI kepada pelaku usaha lainnya, sehingga bisa memberikan inspirasi dan motivasi dalam menerapkan SNI.

Dalam meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK, BSN berkomitmen tinggi untuk menumbuhkan minat (*Interest*) masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang SPK, melalui jalur pendidikan formal dan non formal, antara lain:

- **menyebarluaskan Pendidikan Standardisasi di Pendidikan Tinggi,**

BSN telah mengembangkan kurikulum Pendidikan Standardisasi yang di dalamnya mencakup pengetahuan tentang 3 pilar pengembangan berkelanjutan yaitu Metrologi, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN telah menyusun ulang buku “Pengantar Standardisasi” sebagai bahan ajar di Pendidikan Tinggi yang disesuaikan dengan perkembangan Nasional dan Internasional. Hingga tahun 2014 BSN sudah menjalin kerjasama dengan 32 Perguruan Tinggi. Materi Pendidikan Standardisasi selain diajarkan secara tatap muka juga disebarluaskan melalui *e-learning* Standardisasi (<http://elearning.bsn.go.id>);

- **Menyelenggarakan pelatihan kepada para pemangku kepentingan**

Pelatihan diselenggarakan baik melalui pelatihan reguler yang diselenggarakan BSN maupun *in house training* yang dilakukan atas permintaan *stakeholders*. Saat ini sudah dikembangkan registrasi *on-line* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana publik dapat dengan mudah mencari, mendaftar dan mengikuti pelatihan standardisasi yang dibutuhkan. Dampak positifnya jumlah peserta pelatihan teknis di bidang SPK meningkat dari tahun ke tahun.

- **Memperkenalkan Standardisasi di Sekolah Menengah,**

BSN sudah meluncurkan buku ‘SMK Mengenal SNI’ yang sudah diterapkan di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Jabodetabek. Pusdikmas melakukan Edukasi standardisasi kepada siswa sekolah menengah melalui ajang Kompetisi Standardisasi yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan dua tim dari Indonesia mengikuti ajang olimpiade standardisasi tingkat Internasional di Korea Selatan, tahun 2014

- **Menumbuhkan minat anak-anak di bidang standardisasi sejak usia dini,**

Dengan menanamkan Nilai-nilai budaya standar melalui kegiatan ekstra kurikuler “Jambore untuk Generasi Muda (GEMA) SNI” dengan konsep bermain sambil belajar. Dalam kegiatan ini, siswa dan guru diajak mengunjungi Industri Penerap SNI yang produknya sudah di kenal oleh anak-anak. Kegiatan ini cukup efektif dan banyak diminati oleh siswa dan guru, karena mereka mendapatkan nilai tambah pengetahuan baru yang tidak didapat di sekolah.

Budaya mutu merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan efektifitas fungsi sistem standardisasi nasional dalam mencapai tujuan dan sasarannya. budaya standar harus selalu diperkuat karena pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pengembangan standardisasi nasional ini pada akhirnya lebih bergantung pada kesadaran seluruh pihak untuk menerapkannya. Adapun permasalahan yang dihadapi untuk meningkatnya budaya standar antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemangku kepentingan akan pentingnya standardisasi.
2. Kurang diterapkannya SNI secara konsisten sebagai acuan persyaratan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk secara sukarela menerapkan SNI yang berisi persyaratan mutu tambahan yang dikehendaki oleh konsumen di pasar nasional,
4. Kurangnya kesadaran konsumen untuk memilih produk bertanda SNI untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesehatannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi
6. Ketersediaan sumber daya yang tidak sebanding dengan tuntutan pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi ke seluruh wilayah Indonesia

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diprogramkan dengan baik, sehingga peran pelaku usaha dan masyarakat yang pada saat ini lebih banyak untuk mematuhi aturan regulasi teknis berbasis SNI, pada periode 2015-2019 akan berbalik menjadi inisiator dan penggerak penerapan SNI. Sistem pendidikan standardisasi di Perguruan tinggi harus diperkuat dan diperluas untuk berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga para pelaku standardisasi nasional di masa depan telah memiliki basis pengetahuan tentang standardisasi yang siap dimanfaatkan untuk mendukung penguatan peran standardisasi dalam berbagai sector.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. VISI

Visi PUSDIKMAS

**“ Mewujudkan Masyarakat Indonesia
yang Berorientasi Standar ”**

1.2. MISI

Untuk mencapai visi, Pusdikmas mempunyai misi yaitu

**" Mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik
di bidang Standardisasi dan penilaian kesesuaian "**

1.3. TUJUAN

- a. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian
- b. Membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penialain kesesuaian
- c. Mewujudkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian



1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusdikmas adalah meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Strategis

Kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya untuk melaksanakan misi dalam rangka untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran organisasi. Kebijakan dan Strategi Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi selama periode tahun 2015 sampai 2019 di fokuskan pada upaya yang menyeluruh dan terpadu untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran strategis Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

Untuk melaksanakan misi mengembangkan dan melaksanakan edukasi publik di bidang standardisasi dan penilaian, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi mempunyai sasaran strategis meningkatnya masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian serta meningkatnya persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi menetapkan kebijakan yaitu:

1. Penetapan program Pengembangan sistem diklat yang berorientasi pada upaya peningkatan infrastruktur mutu yang mengacu pada standar
2. Penetapan program peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Penetapan program pemasarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
4. Penetapan program peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian

3.2. Kegiatan

Untuk mendukung visi dan misi serta , Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi mempunyai satu kegiatan yaitu Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi yang meliputi beberapa sub kegiatan:

- a. **Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi baik formal maupun non formal** melalui:
 - 1) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan tinggi
 - 2) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan menengah
 - 3) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan dasar

- 4) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan umum (luar sekolah).
- 5) Pengembangan *Distance Learning* Standardisasi

b. Pengembangan dan pembinaan pelatihan standardisasi, melalui:

- 1) penyelenggaraan layanan jasa pelatihan reguler,
- 2) penyelenggaraan layanan jasa pelatihan *in-house*.

c. Pemasyarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), melalui:

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran standardisasi dan penilaian kesesuaian. Pemasyarakatan standardisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang terdiri dari akademisi, pelaku usaha, regulator dan konsumen. Penyelenggaraan promosi standardisasi dilakukan dengan berbagai cara baik melalui media maupun pertemuan langsung kepada masyarakat. Pemasyarakatan Standardisasi dilakukan dengan cara:

1) Promosi SPK kepada regulator

Promosi ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Kementerian/Lembaga (K/L) tentang pedoman dalam membuat regulasi berbasis SNI, sehingga diharapkan regulasi yang ditetapkan tidak merugikan pasar dalam negeri dan bersifat adil. Disamping itu, Promosi SPK juga perlu dilakukan kepada K/L terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga pengadaan barang di K/L berorientasi SNI yang dapat mendorong tumbuhnya produk ber-SNI di pasar dalam negeri.

2) Promosi SPK kepada pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

SNI ditetapkan untuk diterapkan oleh pelaku usaha/organisasi. Untuk meningkatkan *awareness* pelaku usaha dalam penerapan SNI, perlu dilakukan promosi dan edukasi mengenai substansi SNI kepada pelaku usaha dan juga LPK. Disamping itu, Pusdikmas juga perlu mempromosikan manfaat atau *value* dari penerapan SNI kepada pelaku usaha dengan memanfaatkan *role model* penerap SNI sebagai duta SNI.

3) Promosi SPK kepada publik/konsumen

Untuk melindungi konsumen dari produk yang tidak berstandar dan tidak aman, BSN perlu memberikan edukasi kepada publik tentang pentingnya memilih produk yang ber-SNI dan memberikan pemahaman bahwa produk

yang ber-SNI merupakan produk yang aman, sehat dan berkualitas. Promosi ini dilakukan melalui berbagai strategi baik melalui *above the line* (promosi melalui media TV, Radio, Iklan di area publik/terbuka dll) dan *below the line* (digital dan sosial media, event, pertemuan, lomba dll)

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Dalam UU No 20 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), peran serta masyarakat dalam kegiatan SPK salah satunya dilakukan melalui membangun budaya standar. Budaya dapat dirumuskan sebagai seperangkat nilai-nilai, sikap, keyakinan dan nilai-nilai yang dibangun bersama oleh mayoritas masyarakat. Untuk itu membangun budaya standar perlu partisipasi aktif masyarakat. Membangun dan mengembangkan komunitas di bidang SPK salah satu langkah untuk meningkatkan pelibatan masyarakat dalam kegiatan SPK. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan SPK merupakan langkah *bottom up* yang akan mendasari terwujudnya budaya standar di kalangan masyarakat. Kesadaran diri untuk peduli dan menjadi teladan serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama merupakan proses pembudayaan standar yang mulai mengakar dan terus menyebar. Melihat tantangan tersebut, maka partisipasi dan pemberdayaan (*empowering*) masyarakat sangat diperlukan untuk terwujudnya budaya standar. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat maka pemanfaatan mitra standardisasi sangatlah penting baik itu komunitas masyarakat, asosiasi maupun kelompok yang ada di masyarakat.

1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Untuk mewujudkan SNI sesuai dengan kebutuhan pasar, masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan standardisasi mulai dari pengusulan SNI sampai terlibat dalam pengawasan penerapan SNI, dengan melaporkan apabila ada penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penerapan SNI. Untuk itu, informasi mengenai SNI harus cepat dan mudah dipahami/ditrima oleh masyarakat. Peran serta masyarakat dalam kegiatan SPK meliputi:

a. Peran serta dalam pengembangan SNI

Partisipasi dalam pelaksanaan pengembangan SNI yaitu dengan mengusulkan usulan rancangan SNI kepada BSN dan memberikan masukan dalam proses perumusan SNI.

b. Peran serta dalam mendapatkan informasi SNI

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencari dan mendapatkan informasi untuk menerapkan standar. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pemantauan penerapan SNI yaitu dengan melaporkan adanya:

- penyalahgunaan dan/atau pemalsuan dokumen SNI, Sertifikat Barang, Jasa, sistem, proses, atau personel; atau
- penggunaan tanpa hak Tanda SNI/Tanda Kesesuaian; dan/atau
- pembubuhan Tanda SNI/Tanda Kesesuaian yang tidak sesuai dengan Sertifikat pada Barang kemasan yang beredar di pasar, kepada Instansi Pemerintah Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum dan/atau institusi terkait.

c. Peran serta dalam pemanfaatan SNI

Masyarakat dapat memanfaatkan SNI dalam kehidupan sehari-hari dan turut serta dalam membangun budaya standar.

2) Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

UU No. 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pasal 53 yaitu:

- 1) BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI
- 2) Terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil, diberikan pembinaan paling sedikit berupa fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi
- 3) Pemberian fasilitas pembiayaan Sertifikasi dan pemeliharaan Sertifikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesuai amanah UU No 20 tersebut, Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi perlu melakukan pembinaan penerapan SNI kepada masyarakat dan

pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil, termasuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi SNI. Program ini dapat disinergikan dengan mitra di berbagai wilayah dengan pemanfaatan sistem *clustering* UKM. Pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan teknis penerapan standar untuk pelaku usaha
- b. Fasilitasi pembiayaan dan pemeliharaan sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil yang bersumber pada anggaran pemerintah;
- c. Peningkatan kompetensi dan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar;
- d. Pemasarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
- e. Edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bertanda SNI dan/atau tanda kesesuaian

3) Peningkatan partisipasi konsumen dalam kegiatan standardisasi

Konsumen selaku pemangku kepentingan bisa berkontribusi dalam memberikan usulan kebutuhan standar. Dengan demikian standar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan kepentingan konsumen. Industri merupakan pengguna standar, konsumen adalah pengguna akhir dari produk dan service yang dihasilkan oleh industri. Informasi dari konsumen berupa keluhan konsumen, data kecelakaan, notifikasi *recall*, dan pengawasan pasar merupakan masukan bagi perumusan standar baik itu usulan baru, revisi standar tertentu, dan dapat menjadi dasar untuk menjadi standar wajib.

Dalam pengembangan standar Internasional, Indonesia menjadi anggota ISO COPOLCO yang merupakan suatu komite di ISO yang membidangi keterlibatan konsumen dalam pengembangan standar internasional. Konsumen dapat menyuarakan kepentingannya terkait standar yang dirumuskan dari sisi perspektif konsumen. Manfaat keterlibatan konsumen dalam pengembangan standar, yaitu:

- Menambah nilai kualitas standar
- Membantu perusahaan memahami produk dan layanan mereka dari perspektif konsumen
- Kualitas produk yang lebih baik dan layanan yang lebih mudah digunakan dan lebih relevan dan berguna untuk konsumen

BSN sebagai lembaga yang menetapkan SNI, perlu mendorong konsumen untuk berperan aktif dalam perumusan standar tersebut. BSN melalui Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi membentuk kelompok kerja (POKJA) *ISO COPOLCO* yang beranggotakan dari perwakilan konsumen baik organisasi pemerintah maupun swasta

yang bertugas mereview dan berkontribusi dalam usulan draft standar/*guide ISO/COPOLCO* yang terkait dengan kepentingan konsumen, Merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan konsumen, Menyuarakan kepentingan konsumen terkait kebijakan dalam perumusan dan penerapan standar baik di tingkat nasional dan internasional, Dapat menjadi salah satu *expert* dalam *working group* di *ISO/COPOLCO* dan Melakukan edukasi bersama antar K/L terkait perlindungan konsumen. Melalui kegiatan ini diharapkan partisipasi konsumen aktif dalam kegiatan standardisasi yang dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha dalam penerapan standar dan juga menyuarakan kepentingan standar.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi dan Badan Standardisasi Nasional. Dengan demikian diharapkan kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui edukasi publik.

Untuk pencapaian visi dan misi Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Standardisasi Nasional dan kegiatan Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja di Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

Renstra Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi ini merupakan turunan dari Renstra Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016
PUSAT PENDIDIKAN DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	Penanggung Jawab Evaluasi	
			2015	2016	2017	2018	2019	satuan			
Customer Perspectives											
Meningkatnya budaya mutu	1	Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk bersNI	Indeks persepsi masyarakat dengan skala likert 1-5 (survei dapat dijadikan satu dengan IKU No. 2)	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	Skor	Survei oleh pihak ketiga	Dep IPS (Pusdikmas)
	2	Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	Indeks persepsi masyarakat dengan skala likert 1-5	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	Skor	Survei oleh pihak ketiga	Dep IPS (Pusdikmas)
	3	Indeks kepuasan pelanggan pelatihan bidang SPK	Angka skor indeks - diperoleh melalui penyebaran ke peserta pelatihan	82	83	84	85	86	skor	Data hasil survei kepuasan pelanggan	Pusdikmas

Internal Process Perspectives											
Meningkatnya Masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK	4	Persentase peningkatan jumlah peserta pendidikan dan pelatihan SPK	$\frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$ <p>X_n = jumlah peserta diklat di bid SPK thn n X_{n-1} = jumlah peserta diklat di bid SPK thn n-1</p>	+10	+20	+30	+40	+50	%	Data peserta diklat baik offline maupun online (diklat.bsn.go.id; elearning@bsn.go.id)	Pusdikmas
	5	Persentase peningkatan jumlah materi pendidikan dan pelatihan SPK yang dihasilkan dan penyebarluasan hasilnya	$\frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$ <p>X_n = jumlah materi diklat di bid SPK thn n X_{n-1} = jumlah materi diklat di bid SPK thn n-1</p>	+10	+20	+30	+40	+50	%	Data materi diklat di bidang SPK, baik materi baru maupun pembaruan	Pusdikmas
	6	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK	$\frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$ <p>X_n = jumlah partisipasi masyarakat di bid SPK tahun n X_{n-1} = jumlah partisipasi masyarakat di bid SPK tahun n-1</p>	+10	+20	+30	+40	+50	%	Data masyarakat yang mendapatkan edukasi di bid SPK baik melalui media cetak, elektronik maupun pertemuan langsung dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan SPK	Pusdikmas

	7	Persentase peningkatan jumlah materi promosi SPK yang disebarluaskan kepada stakeholder	$\frac{X_n - X_{n-1}}{X_{n-1}} \times 100\%$ <p>X_n = jumlah materi promosi di bid SPK tahun n X_{n-1} = jumlah materi promosi di bid SPK thn $n-1$</p>	+10	+20	+30	+40	+50	%	Data materi promosi dalam bentuk video yang dibuat oleh Pusdikmas dan disebarluaskan kepada publik	Pusdikmas
Learning and Growth Perspectives											
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Pusdikmas yang profesional	8	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusdikmas yang meningkatkan kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah ASN Pusdikmas yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis}}{\text{Jumlah ASN Pusdikmas}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	%	Data rekap ASN Pusdikmas yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis	Pusdikmas
	9	Realisasi anggaran Pusdikmas	$\frac{\text{Realisasi anggaran Pusdikmas sesuai SP2D}}{\text{Pagu anggaran Pusdikmas}} \times 100\%$	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	%	Data realisasi anggaran Pusdikmas sesuai SP2D	Pusdikmas
	10	Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola Pusdikmas	Jumlah sistem Aplikasi dan pengembangannya yang disediakan Pusdikmas dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.	2	2	3	3	4	Aplikasi	Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Pusdikmas	Pusdikmas

Kegiatan Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi

**Anggaran
(Rp.)** 7,191,654,000

Pihak Kedua Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama

Erniningsih Metrawinda Tunus